

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PAJAK
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011
(Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Mu'amalah**

Oleh :

JULIA ARVINA

1421030029

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2018 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PAJAK
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011
(Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Mu'amalah**

Oleh :

JULIA ARVINA

1421030029

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs.Susiadi AS,M.Sos.I.

Pembimbing II : Drs.H.Ahmad Jalaluddin,S.H.,M.M.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2018**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011

(Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung)

Oleh:

Julia Arvina

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkembangan di negara Indonesia, salah satu pajak yang memberikan sumbangsih besar bagi kas negara yaitu pajak daerah salah satunya adalah Pajak progresif merupakan pajak yang difokuskan pada masyarakat yang mempunyai jumlah kendaraan lebih dari satu dan kendaraan yang keduanya terkena tarif pajak progresif ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah dijalankan oleh pihak kantor bersama Samsat yang telah menerapkan pelaksanaan pajak progresif di atur di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011.

Oleh karena itu yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung? Serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandar Lampung.

Adapaun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitaian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan dan prilaku yang mereka amati. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan pengolahan datanya menggunakan pengolahan data pemeriksaan data, sistematika data, dan analisa.

Dari penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perda Kota Bandar Lampung, akan tetapi masih ada hambatan dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam Perda yang telah dibuat terasa berat bagi masyarakat karena dalam Islam pajak harus dikumpulkan dengan keadilan tidak boleh melampaui kemampuan rakyat untuk membayarnya akan tetapi diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan umat dan membantu pemerintah Kota Bandar Lampung.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703331,780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : **JULIA ARVINA**

NPM : **1421030029**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah & Hukum**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERDA LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN
2011 (Studi di Samsat Kota Bandar Lampung).**

MENYETUJUI

Untuk dimunagasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS, M.SoS.I.
NIP.195808171993031002

Pembimbing II

Drs. H.Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.
NIP.195703051978031001

Ketua Jurusan

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 19720826 2003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 (Studi di Samsat Kota Bandar Lampung).**

**Disusun oleh Julia Arvina NPM. 1421030029 Program Studi Mu'amalah, telah
diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Raden
Intan Lampung pada Hari / Tanggal :**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr.Hj.Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji II : Drs.Susiadi AS,M.Sos.I.



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

¹MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS.Al-Maidah : 2)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Semarang: CV.Adi Grafika Semarang, 1994), h. 156

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk :

1. Ayahanda tercinta, Ayah Aminnudin dan Ibunda tercinta, Rosmani, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan sekeling-kelingnya dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Adikku Lara Septia atas yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat bagi keberhasilan ayunda selama ini menjalani studi.
3. Terima kasih juga Macik Nurli, Macik Lili, Mamak Adi, Nek Ino dan Nek Anang yang selalu mendukung setiap perjuangku dan telah membantu dalam segala hal apapun.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap **Julia Arvina**, Putri pertama pasangan Bapak Aminnudin dan Ibu Rosmani. Lahir di Padang Gelai, pada tanggal 07 Juli 1996. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang Adik Perempuan bernama Lara Septia.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Muara Runga Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pasemah Air Keruh (Sumsel) pada tahun 2002 sampai selesai 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Padang Bindu Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pasemah Air Keruh (Sumsel) pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2014 dan selesai tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 (Studi di Samsat Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila di dalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terima Kasih Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh.Mukri, MA.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Drs.Susiadi AS,M.Sos.I. selaku Pembimbing I dan Drs.H.Ahmad Jalaluddin,S.H.,M.M,. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
6. Terima kasih banyak Kepada Instansi Samsat Kota Bandar Lampung dan Badan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Bapak Ayung,Maman dkk serta yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara;
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
9. Sahabat-sahabatku, Rahila, Lia Resti, Hernik, Dian Pertiwi,Deni Ariska, Pradesno Firdaus, Fauzi Perdana Alamsyah.
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah E 2014 dan Teman Satu Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Teman KKN Wates 212.
11. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 14 Maret 2018

Penulis

Julia Arvina
NPM.1421030029

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN	1
A.Penegasan Judul	1
B.Alasan Memilih Judul	4
C.Latar Belakang Masalah.....	4
D.Rumusan Masalah.	10
E.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.	10
F.Metode Penelitian.	11

BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A.Pengertian Pajak Secara Umum dan Syari'ah	19
1. Pengertian Pajak secara umum dan syari'ah.....	19
2. Dasar Hukum Pendapatan Pajak Daerah Menurut Hukum Islam.	29
3. Tarif-tarif Pajak.	27
4. Fungsi Pajak	36
5. Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	36
6. Kedudukan Hukum Pajak.....	38

7. Pengelompokan Pajak.	39
8. Asas Pemungutan Pajak.	40
B. Macam-Macam Pendapatan Negara.	44
C. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Menurut Hukum Islam	54
D. Pengertian Pajak Progresif.....	70
BAB III DATA LAPANGAN.	73
A. Kondisi Umum Tentang SAMSAT Kota Bandar Lampung	73
B. Bagaimanakah Praktek Pajak Progresif Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung	83
C. Bagaimanakah Pendapat Masyarakat Terhadap adanya Pajak Progresif	88
BAB IV ANALISIS PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH.....	91
A. Pelaksanaan Praktik Pajak Progresif Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung.....	91
B. Tinjauan Hukum islam terhadap Pajak Progresif di Samsat Kota Bandar Lampung	95
BAB V PENUTUP.	98
A. Kesimpulan.	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 (Studi di Samsat Kota Bandar Lampung).** Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. **Analisis adalah** penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, atau hubungan antara

bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

2. **Hukum Islam adalah** hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan Hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.²

3. **Pajak Progresif adalah** suatu tarif yang persentasenya semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak semakin menjadi lebih besar.³

4. **Kendaraan bermotor adalah** semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

¹ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer, Modern English Press*, (Jakarta, 1999), h.61

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, (Semarang :Pustaka Rizky Putra, 2001), h.21

³ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2003), h.183

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung)**. Karena perbedaan pembayaran yang dimiliki dalam satu nama pemilik, yang mana untuk kepemilikan pertama pembayaran tarif pajaknya berbeda dengan pembayaran kedua yang selisih pembayarannya cukup tinggi, sehingga menarik penulis untuk mengkajinya untuk mengetahui sebab-sebab apa yang membedakan didalam pembayaran pajak progresif. Yang mana pengertian dari penelitian adalah suatu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas terhadap pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor yang sesuai dengan undang-undang dan kemudian ditinjau berdasarkan hukum islam.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di dalam Bab I Ketentuan Umum.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, mengingat perkembangan perpajakan merupakan suatu kas negara yang berpengaruh pada negeri ini dan mengingat pajak adalah salah satu pendapatan daerah yang sangat berpengaruh salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber pendanaan penting dalam kerangka otonomi daerah.
2. Alasan Subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syariah khususnya jurusan Mu'amalah. Serta mempermudah bagi penulis untuk mendapatkan sumber/referensi yang ada dipustaka syariah, serta karya ilmiah dari para ahli.

C. Latar Belakang Masalah

Pajak di dalam Undang-Undang Negara RI 1945 dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, sedangkan Secara umum, Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang penting di

Pemerintahan Provinsi Lampung, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang mana kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat 1b dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2011 bahwa tarif pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara Progresif untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).⁵

Berkeaan dengan semakin bertambahnya kemajuan hidup yang disertai semakin padatnya penggunaan kendaraan bermotor untuk beraktivitas, maka bertambah pula jumlah kendaraan bermotor di kota besar tak terkecuali Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Semakin majunya taraf kehidupan masyarakat diperkotaan sejalan dengan semakin padatnya kendaraan bermotor sehingga perlu diatur. Peraturan yang konsisten dan efektif sangat diperlukan di kota-kota besar Khususnya Kota Bandar Lampung dengan sempurnanya pelaksanaan aturan tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk curang.

⁵ Pasal 23A UUD Negara RI tahun 1945 menyebutkan *Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang Indonesia*. Ketentuan Pasal 23A tersebut menjadi dasar konstitusional sistem perpajakan termasuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di dalam Pasal (1) dan (2) UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat 1b dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan oleh sebab itu kebijakan penerapan Pajak Progresif akan mampu menekan penggunaan bermotor di kota-kota besar.⁶

Pada nyatanya, sebagian besar warga kota Bandar Lampung belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan tidak sedikit permasalahan pada saat warga membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka sering kali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama. Dengan terdatanya satu nama mengatas namakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraanya sudah berpindah tangan,

⁶ Marhot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2008), h. 35

semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Provinsi Lampung sebagai provinsi yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat khususnya di perkotaan. Perkembangan jumlah kendaraan seperti ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung seperti di Kota Bandar Lampung untuk menarik pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung dan Kepemilikan jumlah kendaraan tersebut sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif mengandung unsur keadilan dimana orang yang makin kaya sudah sewajarnya membayar pajak lebih tinggi. Selain hal-hal tersebut diatas sebab lain pemerintah menerapkan aturan ini adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan pemerintah daerah provinsi Lampung di masa mendatang. Aturan pajak yang baru ini diharapkan dapat menutup hilangnya potensi pendapatan asli daerah. Kenaikan pajak selain didasari oleh target pendapatan daerah, juga mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti untuk mengendalikan

polusi, mengurangi kemacetan, dan lain sebagainya hanya untuk kemaslahatan umatnya.

Di antara masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Firman Allah SWT Q.S.At-Taubah ayat 29 :⁷

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah(Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.⁸

⁷ Jizyah adalah pajak per-kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h 191.

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan untuk memerangi ahlul kitab, ayat ini pula dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa jizyah dikenakan kepada ahlul kitab saja, sedangkan selain itu mereka ditawari masuk Islam atau diperangi, jika mereka tidak mau masuk Islam maka mereka diperangi sampai mereka mau membayar jizyah dalam terpaksa kalah dan lemah.⁹

Sejak adanya tarif pajak progresif pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak lebih mahal untuk pemilik kendaraan kedua dan seterusnya. Dampak diterapkannya tarif pajak progresif ini berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung karena jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak meningkat sehingga penulis tertarik mengkaji bagaimanakah pelaksanaan pajak progresif di Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pajak progresif kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung).**

⁹ Ajeng Mulati, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Bandar Lampung ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung ?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pajak

progresif yang terus berkembang di Indonesia, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pajak progresif yang sesuai dengan Hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- c. Secara Akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pelaksanaan pajak progresif di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 pada Samsat Kota Bandar Lampung sehingga memberikan kontribusi positif terhadap praktek pajak progresif.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁰ Adapun masalah metode penelitian ini penulis menjelaskan sebagai berikut

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.1

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹¹ Penelitian ini juga menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹³ Dalam penelitian ini akan dijelaskan Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Analisis Hukum

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹² Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

Islam tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2011 serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung dari pegawai Samsat Kota Bandar Lampung setempat yang berkaitan tentang Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan pajak progresif di berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku mengenai panjang yang dapat menunjang pembahasan permasalahan.dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹⁵

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁵Ibid., h. 58.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah semua objek penelitian mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah samsat Kota Bandar Lampung.

b. Sample

Sample adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan tekning pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *propositive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa orang yang mengetahui secara pasti tentang pajak progresif kendaraan bermotor. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 11 orang meliputi pegawai Samsat Kota Bandar Lampung, pegawai Badan Pendapatan Daerah, dan beberapa orang yang terkena pajak progresif kendaraan bermotor.

¹⁶Amiridin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM,1986). H. 27

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Wawancara

yaitu suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁷ yang diperlukan penulis untuk melengkapi laporan yang sedang ia teliti. Metode interview yang penulis pergunakan ialah interview bebas terpimpin yaitu menginterview dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interview.¹⁸

b. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

¹⁷ *Ibid.hlm 70*

¹⁸ *Ibid.hlm 107*

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandar Lampung Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

c. Metode Dokumentasi

Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat yang sudah ada dalam dokumen atau arsip yang sudah ada yang berkaitan tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian.

d. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul

¹⁹Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.57.

itu tidak logis dan meragukan.²⁰ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²¹ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.²²

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh. Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.115.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.126.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.

progresif kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.1. Pengertian Pajak Secara Umum dan Syari'ah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pengertian pajak menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dwikora Harjo, 2013:4) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan

¹Sonny, Isnianto, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Yogyakarta : Penerbit CV.Andi , 2009), h.1

²Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.³

Pajak yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Hal tersebut adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.⁴

Istilah pajak baru muncul pada ke-19 di Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dikuasai oleh pemerintahan Kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814, di mana pada waktu itu diadakan pungutan *Landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkan peraturan *landrente-stelsel*, yang menentukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh

³Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan*, (Bandung: Penerbit Prenada Media Group, 2006), h. 21

⁴Munawir, *Pepajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberti Yogyakarta, 1997), h.3

pemilik tanah kepada pemerintah Inggris, di mana jumlah uang tersebut setiap tahun hampir sama besarnya.⁵

Penduduk menamakan pembayaran *Lanrente* sebagai *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari kata bahasa Jawa *ajeg*, artinya tetap. Jadi dengan *duwit pajeg* diartikan sebagai jumlah uang yang tetap pada tiap tahunnya harus dibayar dalam jumlah yang sama.⁶

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. salah satunya definisi yang diberikan oleh :

- a. *Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector pemerintah)berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.*
- b. *Dr.Soeparman Soemahamidjaja bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.*⁷

Berdasarkan definisi tersebut maka karekteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010), h. 31

⁶ *Ibid*

⁷ Munawir, *Pokok-pokok perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), h. 1

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak yang terhutang oleh pribadi atau badan { wajib pajak sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak (*tax payer*) tidak dapat menikmati komtrapersi secara langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya.⁸ Pajak Menurut Syariat bagi petugas zakat (amil), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Swt.⁹

Demikian pula hendaknya petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan

⁸ *Ibid.*, h. 3

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pes, 2007), h. 26

mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi Wajib Pajak sebagai jihad harta.¹⁰ Sebagaimana Firman Allah Swt :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. (QS.Al-Zalzalah : 7)¹¹

Kata Pajak dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun terdapat kata 'pajak' karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab. Buktinya, konsonan "P" tidak ada dalam bahasa Arab. Karenanya, jika menyebut 'liverpool' misalnya, orang Arab menyebutnya 'Libirbuul', Padang di sebut Badang, dan lain-lain. Jadi, kata 'pajak' memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.¹² Sebagaimana Firman Allah Swt :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٦﴾

¹⁰*Ibid*

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Cordoba, 2013), h. 599

¹²Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 27

*Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(QS.At-Taubah 29)*¹³

Secara *etimologi*, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar **ضرب، يضرب، ضربا** (*dharoba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.¹⁴

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (**ضريب**), yang dapat berarti beban, *dharibah*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang rebat).¹⁵

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaanya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, h.187

¹⁴Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 28

¹⁵*Ibid*

memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.¹⁶

Ada tiga ulama memberikan definisi tentang pajak adalah sebagai berikut :

1. Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazy Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.¹⁷

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 31

Pajak menurut hukum islam adalah bagian kewajiban-kewajiban lain selain zakat yang bisa menjadi wajib karena sebuah kesepakatan dalam hidup bernegara menjadi wajib karena merupakan ketaatan kepada waliyyul amri. Adapun karakteristik menurut Hukum Islam dapat di pungut apabila tidak ada keberatan dan mampu untuk membayarnya karena pajak dalam Islam itu bukan tetap tapi kondisional.

2. DASAR HUKUM PENDAPATAN PAJAK DAERAH MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hal ini suatu penerimaan negara telah dijelaskan dalam Firman Allah QS.Al-Anfal Ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
وَالْيَتَامَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ
أَلْجَمْعَانَ ^{قُلْ} وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,¹⁸ Maka Sesungguhnya

¹⁸ Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr.

seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,¹⁹ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa²⁰ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,²¹ Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²²

3. TARIF – TARIF PAJAK

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif proporsional atau disebut juga tarif sebanding ialah tarif dengan menggunakan prosentase tetap, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan besarnya nilai objek yang dikenakan pajak.²³

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak terhutang tidak tergantung pada suatu jumlah yang dikenakan pajak.²⁴

¹⁹ Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

²⁰ Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.

²¹ Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

²² Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h.267

²³ Atep Adya Barata, *Perpajakan*, (Bandung : Penerbit CV. ARMICO, 1995), h. 39

²⁴ Munawir, *Op.Cit.*, h. 16

3. Tarif Pajak yang Progresif atau Meningkatkan

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.²⁵ Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase, dan bukan persentase tunggal. Penerapan tarif progresif di dalam pajak penghasilan tidak dilakukan secara absolut (*flat rate*) melainkan secara berlapis (*bracket rate*).²⁶ Pajak progresif kendaraan bermotor menggunakan tarif pajak progresif atau meningkat karena semakin tinggi besarnya jumlah yang digunakan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar atas nama pribadi yang bersangkutan. Misalnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan kena pajak Rp. 10.000.000,-	15%
Penghasilan kena pajak Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	25%
Penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,-	35%

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

²⁵ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Op.Cit., h. 9

²⁶ Ibid, h.11

Tarif Pajak yang progresif ini dapat di bagi lagi menjadi :

a. Progresif Proporsional

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan prosentase untuk setiap jumlah tertentu adalah tetap. misalnya :²⁷

Tabel 2. Progresif Proporsional

Jumlah yang kena pajak	Tarif	Kenaikan tariff
Rp. 1,- s/d Rp.200.000,-	10%	-
Rp. 200.001,- s/d Rp.400.001,-	11%	1,0 %
Rp. 400.001,- s/d Rp.700.000,-	12%	1.0 %
Rp. 700.001,- s/d Rp.1.000.000,-	13%	1.0 %
Rp. 1.000.001,- s/d Rp.1.400.000,-	14%	1.0 %

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

Tarif progresif proporsional masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif proporsional absolute dan tarif progresif proporsional berlapisan.

Tabel 3. Tarif Progresif Proporsional Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d Rp. 10.000.000 =10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000 x 10 %)

²⁷*Ibid*

Rp. 20.000.000	di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000=15%	5%	Rp. 3.000.000 (20.000.000 x 15%)
Rp. 30.000.000	di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000=20%	5%	Rp. 6.000.000 (30.000.000 x 20%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000=25%	5%	RP. 10.000.000 (Rp. 40.000.000 x 25%)

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

Tabel 4. Tarif Progresif Proporsional Berlapisan

Dasar Penaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d Rp. 10.000.000=10%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)
Rp. 20.000.000	di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000=15%	5%	Rp. 2.500.000 (10.000.000 x 10%+10.000.000 x 15%)
Rp. 30.000.000	di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000=20%	5%	Rp. 4.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15% + 10.000.000 x 20%)
Rp. 40.000.000	di atas Rp. 30.000.000=25%	5%	Rp.4.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15% + 10.000.000 x 20% + 10.000.000 x 25%)

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

a. Progresif Degresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentasenya untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun. misalnya:²⁸

Tabel 5. Tarif Progresif Degresif

Jumlah yang kena pajak	Tarif	Kenaikan tarif
Rp. 1,- s/d Rp. 200.000,-	10%	-
Rp. 200.001,- s/d Rp. 400.000,-	12,5%	2,5%
Rp. 400.001,- s/d Rp. 700.000,-	14,5%	2,0%
Rp. 700.001,- s/d Rp. 1.000.000,-	16%	1,5%
Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 1.400.000,-	17%	1,0%

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

Tarif Progresif-Degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif-degresif absolute dan tarif progresif berlapisan :

Tabel 6. Tarif Progresif-Degresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)

²⁸ Ibid, h.68

Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000 = 25%	15%	Rp. 5.000.000 (20.000.000 x 25%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000 = 35%	10%	Rp. 10.500.000 (30.000.000 x 35%)
Rp. 40.000.000	di atas Rp. 30.000.000 = 40%	5%	Rp. 16.000.000 (40.000.000 x 40%)

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

Tabel 7. Tarif Progresfi Berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)
Rp. 20.000.000	Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 20.000.000 = 25%	15%	Rp. 3.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 25%)
Rp. 30.000.000	Di atas Rp. 20.000.000 s.d. Rp. 30.000.000 = 35%	10%	Rp. 7.000.000 (10.000.000 x 10% = 10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 35%)

Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000 = 40%	5%	Rp. 11.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 35% + 10.000.000 x 40%)
-------------------	---------------------------------	----	--

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

b. Progresfi-Progresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan prosentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik, misalnya:²⁹

Tabel 8. Tarif Pajak Progresif-Progresif

Jumlah yang kena pajak	Tarif	Kenaikan Tarif
Rp. 1,-s/d Rp. 200.000,-	10%	-
Rp. 200.001,-s/d Rp. 400.000,-	11%	1,0%
Rp. 400.001,-s/d Rp. 700.000,-	12,5%	1,5%
Rp. 700.001,-s/d Rp. 1.000.000,-	14,5%	2,0%
Rp. 1.000.001,-s/d Rp. 1.400.000,-	17%	2,5%

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

Tarif Progresif Progresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tarif Progresif-Progresif Absolut dan Progresif-Progresif Berlapisan.

²⁹ Munawir, *Op.Cit.*, h. 9

Tabel 9. Tarif Progresif-Progresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000 = 15%	5%	Rp. 30.000.000 (20.000.000 x 15%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000 = 25%	10%	Rp. 7.500.000 (30.000.000 x 25%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000 = 40%	15%	Rp. 16.000.000 (40.000.000 x 40%)

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

Tabel 10. Tarif Progresif-Progresif Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp. 1.000.000 (10 x 10%)
Rp. 20.000.000	Di atas Rp 10.000.000 s.d. Rp. 20.000.000 = 15%	5%	Rp. 2.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15%)
Rp. 30.000.000	Di atas Rp. 20.000.000 s.d. Rp. 30.000.000 = 25%	10%	Rp. 5.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15% + 10.000.000 x 25%)

Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000 = 40%	15%	Rp. 9.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15% + 10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 40%)
-------------------	------------------------------------	-----	--

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

4. Tarif Degresif

Tarif ialah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pegenaan pajak. Walaupun prosentase pemungutannya semakin kecil namun tidak berarti bahwa pajak yang terhutang juga semakin kecil, bahkan akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak, tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah yang dikenakan pajak.³⁰

Tabel 11. Tarif Pajak Degresif

Jumlah yang kena pajak	Prosentase pemungutan	Besarnya pajak yang terhutang
Rp. 200.000	10%	Rp. 20.000
Rp. 300.000	9%	Rp. 27.000
Rp. 500.000	8%	Rp. 40.000
Rp. 700.000	7%	Rp. 49.000
Rp. 900.000	6%	Rp. 63.000

(Sumber Data dari Buku Munawir tahun 2014)

³⁰ Munawir, *Op.Cit*, h. 10

4. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.³¹ Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.³² Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang diperlukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.³³

b. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.³⁴

5. Syarat Pemungutan Pajak

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

³¹Mardiasmo, *Op.Cit.*, h. 1

³²Siti Kurnia,Ely Suhayati, *Perpajakan*, (Bandung: Penerbit Graha Ilmu Cetakan Pertama, 2009), h. 3

³³*Ibid*

³⁴Mardiasmo,*Op.Cit.*, h. 1

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula dalam hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-hukum lainnya yang membuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya.³⁵

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Penaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya."³⁶

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.³⁷

³⁵Munawir, *Op.Cit.*, h. 10

³⁶*Ibid*

³⁷Mardiasmo. *Tax Perpajakan Edisi Terbaru*, (Bulaksumur : Penerbit Andi, 2016),

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.³⁸

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.³⁹

6. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau

³⁸Munawir, *Op.Cit.*, h. 13

³⁹Mardiasmo, *Op.Cit.*, h. 2

jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari direktur jendral pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

7. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan dan di limpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan pada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

- b. Pajak Obejektif, yaitu pajak yang berpangkal pda objeknya, tanpa memeperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungtannya

- a. Pajak Pusat, pajak yang di pungut pemerintah yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan membiayai rumah tangga daerah.⁴⁰

8. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau di peroleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan di kenakan pajak itu di peroleh atau diterima orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber dari negara itu.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*,h. 5.

⁴¹ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2013), h. 22

b. Asas Domisili

Asas domisili disebut juga asas ke pendudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*recidence*) atau berdomisi di negara itu apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.⁴²

c. Asas Nasional

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Asas yang menganut cara pemugutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili

⁴²Trisna Suryani, Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, (Semarang : Penerbit Graha Ilmu, 2011), h. 3

atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di suatu pihak dengan asas sumber di pihak lainnya.⁴³

- d. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang – undang.

Hukum pajak harus member jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Dasar pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan Undang-Undang.

Pertama, hak-hak fiksus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar telah diketahui oleh umum, bahwa dalam praktik para wajib pajak suka mencoba dengan secara legal ataupun tidak, untuk menghindarkan diri dari yang telah ditentukan oleh undang-undang Pajak keadaan yang semacam ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang, lengkap dengan sanksi-sanksinya.⁴⁴

Kedua, sebaliknya para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan

⁴³ *Op.Cit.*, h. 24

⁴⁴ Andrian Sutedi, *Ibid.*, h. 25

sewenang-wenang oleh fiksus dengan aparturnya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban, melainkan juga hak-hak wajib pajak, antara lain: untuk dalam tingkat pertama mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menetapkan Pajaknya, termasuk juga hak wajib pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak bilamana ia telah ditolak keberatannya mengenai suatu penetapan pajaknya.⁴⁵

Ketiga, yang tidak kurang pentingnya adalah jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

- e. Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat

Pajak selain mempunyai fungsi *budgeter* juga berfungsi mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga politik pemungutan pajaknya diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan

⁴⁵*Ibid.*, h. 26

perdagangan, diusahakan supaya jangan menghalangi-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.⁴⁶

- f. Asas keuangan menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut

Sesuai dengan fungsi *budgeter*, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan memungut pajak sekecil-kecilnya, dibandingkan dengan pendapatnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatnya.⁴⁷

B. Macam – Macam Pendapatan Negara

1. Menurut Pajak Daerah

a. Jenis-Jenis Pajak Provinsi

Pajak Daerah Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangnya, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu

⁴⁶*Ibid.*,h. 27

⁴⁷*Ibid.*,h. 28

pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis-jenis pajak provinsi sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.⁴⁸

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air

yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi

⁴⁸ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011), h.33

karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.⁴⁹

3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.⁵⁰

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaat Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak pengambilan atas pemanfaatan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.⁵¹

⁴⁹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2002), h. 47

⁵⁰ *Ibid*, h.47

⁵¹ *Ibid*

5) Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat. Memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.⁵²

6) Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.⁵³

7) Pajak Hiburan

Pajak hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang

⁵²*Ibid*, h.48

⁵³*Ibid*

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.⁵⁴

8) Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.⁵⁵

9) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.⁵⁶

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵*Ibid*, h. 48

⁵⁶*Ibid*

10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambila bahan galian golongan C yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

11) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁵⁸

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*, h. 49

- 2) Subjek Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- 3) Subjek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- 4) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil,atau memanfaatkan,air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
- 5) Subjek Pajak Hotel adalah orang probadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib Pajaknya adalah pengusaha hotel.

- 6) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- 7) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- 8) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 9) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.
- 10) Subjek pajak penghasilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

c. Objek Pajak Daerah

- 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a) Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - b) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - c) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- 5) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 6) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- 7) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- 8) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- 9) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 10) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- 11) Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

C. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Menurut Hukum Islam

1. *Ghanimah*

Menurut kamus bahasa Arab, *ghanimah* berasal dari kata غنم- غنم, yang berarti ‘memperoleh jarahan’ (rampasan perang).⁵⁹ *Ghanimah* merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah Swt dalam Firman Allah QS.Al-Anfal 41 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ ۖ ثُمَّ اللَّهُ مِمَّا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۚ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami

⁵⁹ Gusfahmi, *Op. Cit.*, h. 78

*turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁶⁰

Pada waktu itu yang turun di Badar (usai Perang Badar), pada bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah. *Ghanimah* merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah Swt. *Ghanimah* ini hanya diperoleh apabila melalui peperangan bentuknya bisa barang bergerak seperti barang perhiasan serta persenjataan yang dirampas dari tangan mereka. Karena diperoleh dengan dasar peperangan dan kekerasan, maka *ghanimah* tidak ada dasar pengenaan dan tarif layaknya pendapatan yang lain seperti zakat, jizyah, dan kharaj. Adapun dalam pendistribusiannya hanya untuk kepentingan kaum muslim bukan non muslim.

2. Sedekah

Sedekah berasal dari kata **صدق** (*shadaqa*), yang berarti benar ialah adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah Swt. dan Rasulnya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama

⁶⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: PT. Raja Fahd, 1971), h. 267

pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketujuannya.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panen. Sedangkan menurut Abu Ubaid, sedekah ini terdiri dari dua macam, yaitu zakat yang dipungut dari kekayaan kaum muslim dan bea cukai yang dipungut dari pedagang muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-pos pabean.

3. Infaq

Infaq dari kata *nafaqa* atau *nafiq* yang berarti habis laku terjual. Infaq menurut pengertian umum adalah *shourful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan).⁶¹ Adapun dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.

4. Zakat

Secara umum zakat disebut “membersihkan diri”. Disebut demikian karena orang yang mengerjakan berarti taqarub kepada

⁶¹Mawan Abdurrahman, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung : Penerbit Tafakur, 2011), h.18

Allah Swt. Adapaun menurut syari'ah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua pensucian, karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, sekaligus mensucikan jiwa manusia dari dosa-dosanya.⁶² Firman Allah Swt

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Artinya : Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS.Al-Baqarah 129)⁶³

Subjek zakat menurut hadis dan rukun islam merupakan umat islam. Karena menurut Nabhani, “zakat dari segi perolehnya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, dan bukan dari orang non-Muslim”. Zakat tidak sama

⁶²Maman Abdurrahman, *Op.Cit.*, h.12

⁶³ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 20

dengan pajak umum melainkan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap salah satu rukun islam.⁶⁴ Harta zakat adalah salah satu jenis harta Baitul Mal (penerimaan negara) sehingga zakat harus dipungut oleh pemerintah, yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Sedangkan bagi pelanggar Zakat (orang kaya) tercantum pada ayat Al-qur'an Surah Al-fushilat Ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (QS.Al-Fushilat)⁶⁵

⁶⁴Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 96

⁶⁵Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : Penerbit Hidakarya Agung, 1957), h. 704

5. *Ushr*

Dikalangan ahli fiqh,sepersepuluh (*'ushr*) memiliki dua arti.

Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.⁶⁶

Subjek ushr diwajibkan hanya ketika ada hasil yang nyata,tanahnya adalah tanah *'ushr* dan pemiliknya adalah orang Islam. Objek *'ushr* ahli hukum menggolongkan hasil pertanian dalam dua katagori : *Pertama*, hasil pertanian sayuran dan jagung dan yang *kedua*, kebun menghasilkan seperti buah-buahan, madu, dan lain-lain. Tujuan penggunaan *'ushr* adalah termasuk juga dalam penerimaan negara tidak penuh yang penggunnya adalah untuk kelompok yang sudah ditentukan langsung oleh Allah Swt.

6. *Fay'i*

Fay'i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay'i menunjukan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fay'i digunakan untuk seluruh harta

⁶⁶*ibid*, h.99

yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut (*kharaj*), pajak kepala (*jizyah*), *bea cukai* (*'ushr*) yang dikenakan dari para pedagang non-Muslim. Dari sudut

pandang pajak, seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Muslim dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu tanah *'usyr* dan tanah *fay'i*. Pajak atas tanah *'usyr* tidak dianggap *kharaj*, melainkan dianggap sebagai zakat dan ia diperuntukan untuk tujuan amal tertentu. Di sisi lain, pendapatan dari tanah *fay'i* disebut *kharaj* dan digunakan untuk pembiayaan umum negara. Jadi ada perbedaan perlakuan antara keduanya, meskipun sama-sama pajak atas tanah. Tetapi yang jelas, seluruh tanah yang berada dibawah kekuasaan Islam, baik melalui penaklukan secara paksa (*anwah*) atau tanpa peperangan atau perjanjian damai (*shulh*), merupakan tanah *fay'i*.⁶⁷

7. *Jizyah*

Istilah *Jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi.⁶⁸ Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk

⁶⁷ *Ibid.*, h. 103

⁶⁸ *Ibid*

non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Dengan kata lain *jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi istilah *jizyah* tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Oleh karena itu, *jizyah* tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama Islam. Dasar Perintahnya QS.Al-Taubah 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَغِيرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.⁶⁹

Subjek *jizyah* dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. *Jizyah* juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam peperangan. Sekali itu, *jizyah* tidak diambil, selain dari orang yang mampu membayarnya dan tidak dari kaum selain pria. *jizyah* sebagai pajak individu (kepala) hanya dipungut dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar. Ia diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal, dan memiliki kemampuan. Dengan makna lain tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang gila, hamba sahaya, dan orang miskin.⁷⁰ Tujuan penggunaan *jizyah* dalam hal kegunaan, *jizyah* merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Hak-hak bagi pembayar *jizyah pertama*, tidak boleh diperangi agar

⁶⁹Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), h. 191

⁷⁰Gusfahmi, *Op.Cit.*, h.105

mereka tidak akan merasa takut. *Kedua*, berhak untuk mendapatkan perlindungan sehingga mereka menjadi orang-orang yang nyaman.⁷¹

8. *Kharaj*

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Para penyewa ini menanamkan tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, *kharaj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan Ijtihad. Tarif *kharaj* yang diambil dari tanah disesuaikan dengan kandungan tanah tersebut. Seorang imam (khalifah) boleh memperkirakan *kharaj* dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu berdasarkan luas tanah, jenis tanaman, dan ukuran hasil panen.

⁷²*Kharaj* dapat dipungut melalui dua cara yaitu :

⁷¹*Ibid.*, h.109

⁷²Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Medan : Prenadamedia Group, 2015), h. 241

- 1) Menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah pajak yang diambil dari hasil panen, misalnya dengan mengambil separuh, sepertiga, atau seperempat bagian dari seluruh hasil panen.
- 2) Adapun Kharaj Tetap adalah pajak yang wajib dikeluarkan atas tanah, baik tanah itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun non-Muslim. Tujuan Penggunaan Kharaj termasuk fay'i karena tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, tetapi justru tanah ini ditahan untuk *kharaj* yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin dalam setiap masa.

9. 'Ushr (Bea Cukai)

Dikalangan ahli fiqh, 10% memiliki dua arti. *Pertama*, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, 10%

diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Subjek alasan dibalik pembedaan bea cukai ini adalah para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh di wilayah *harb*. Oleh sebab itu, Khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari (gubernur) untuk melakukan hal serupa. Jadi terlihat bahwa bea cukai dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang muslim di negara asing. Kemudian bea cukai ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan di negara Islam.⁷³

Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan *darul harb*. Pedagang muslim membayar 10% dari perdagangan mereka ketika memasuki negara kafir. Oleh sebab itu, negara Islam hendak menutupi kerugian ini dengan menerapkan perlakuan yang sama. Sepersepuluh itu sebetulnya tidak termasuk sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ia adalah Ijtihad yang muncul pada masa

⁷³ Gusfahmi, *Op.Cit.*, h.133

Khalifah Umar bin Khattab ra. Dimasa Khalifah Harun

Misalnya, tarif bea cukai yang disarankan Abu Yusuf adalah :

Tabel 12. Subjek dan Tarif ‘Ushr

No .	Subjek	Tarif bea cukai (‘Ushr)	Keterangan
1.	Pedagang Muslim	2,5% per tahun	Berlaku sebagai zakat. Jika ia bersumpah telah membayar zakat, maka ia dibebaskan dari cukai ini
2.	Pedagang Dzimmi	5%	Tarifnya lebih rendah, karena mereka juga wajib membayar jizyah
3.	Pedagang Harbi	10%	Pedagang Harbi. Pembebanan ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang dibrikan kepada mereka di wilayah Muslim.

(Sumber data dari buku Gusfahmi tahun 2007)

Menurut Dr. Hamidullah Rasulullah Saw berinisiatif untuk mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara dengan menghapus semua bea masuk.⁷⁴ Tujuan

⁷⁴ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiiskal*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), h. 26

penggunaan bea cukai ini karena termasuk pendapatan penuh negara, yang dikelompokkan ke dalam fay'i maka '*ushr*' ini dapat digunakan untuk kepentingan umum negara luas. Pengenaan bea cukai ini telah lama dipraktikan sejak adanya perdagangan antar wilayah internasional.⁷⁵

10. Pajak Atas Pertambangan dan Harta Karun

Bila suatu tambang yang padat dan dapat dilebur, mengandung emas, perak, besi, dan sebagainya, atau harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial. Adapun perbedaan pendapat tentang sifat yang dikenakan pada pertambangan dan harta karun. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali ini dianggap sebagai zakat, sedangkan Hanafi menganggapnya sebagai persoalan barang rampasan. Tanpa menyinggung kedua perbedaan tersebut, keduanya merupakan sumber penerimaan negara. Bila suatu pertambangan atau harta karun ditemukan di tanah orang Muslim, maka seperlima harus diserahkan kepada negara.⁷⁶

⁷⁵ Isnaini Harahap, *Op.Cit.*, h. 224

⁷⁶ Abu Yusuf, *Op.Cit.*, h. 68

11. Waqaf

Waqaf atau *waqf* itu secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut *mauqif* karena disitulah berhentinya kendaraan.⁷⁷ Akan tetapi secara umum waqaf adalah sejenis pemberian yang dilaksanakannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwaqafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.⁷⁸ Para ulama Mazhab, kecuali Mazhab Maliki, berpendapat bahwa, waqaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewaqaf bermaksud mewaqafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Itu pula sebabnya, maka waqaf disebut sebagai *shadaqah jariyah*. Jadi, kalau orang yang mewaqafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan saya mewaqafkan barang ini untuk sepuluh tahun atau bila saya membutuhkannya atau dengan syarat bisa saya

⁷⁷ Gusfahmi, *Op, Cit.*, h. 115

⁷⁸ Sumurun Harahap, *Paradigma Baru Waqaf*, (Jakarta: Diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 1

tarik kembali kapan saja saya mau, dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai waqaf dalam pengertiannya yang benar.⁷⁹ Peristiwa waqaf yang pertama dalam sejarah Islam, yaitu pemberian dari Mukhairik, seorang Rabbi Bani Nadhir, yang telah masuk Islam. Ia memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai sedekah.⁸⁰ Umar bin Khatab ra. Juga pernah mewaqafkan sebidang tanahnya di Khaibar, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin, hamba sahaya, ibnu sabil dan kepada para tamu. Waaf ini kemudian diikuti oleh kaum Muslimin pada umumnya selama berabad-abad. Sebagai landasan waqaf dalam Firman Allah QS. Ali- Imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁸¹

⁷⁹*Ibid*, h. 4

⁸⁰Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 116

⁸¹Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), h. 191

12. Beban-beban Lain (Pajak-Pajak Lain)

Ada sejumlah beban (pajak) lain yang pernah dikeluarkan oleh Khalifah Umayyah terdahulu, namun pada masa Khalifah Umar II dihapuskan, seperti beban atas pabrik, hadiah yang diberikan menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan, beban militer, pajak rumah dan beban yang dipungut dari para penjaja seks.⁸² Pajak-pajak demikian dihapuskan karena tidak memiliki sumber (*nash*) yang benar. Jika ditinjau dari asa keadilan dan kesamaan. Pajak tambahan ini diperkenalkan oleh sebagian pengusaha Umayyah karena melemahnya semangat Islam dan meluasnya pengaruh lokal. Hakikat dan tampak dari pajak-pajak ini muda diduga. Karena pajak-pajak ini tidak memiliki prinsip kesamaan dan keadilan, dan tidak memiliki nilai keagamaan, tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh para fuqaha dan akhirnya dihapus oleh penguasa yang adil dan saleh Umar II.⁸³

D. Pengertian Pajak Progresif

Menurut Koswara, pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan

⁸²M.Nazori Majid, *Op.Cit*, h. 178

⁸³Gusfahmi, *Op.Cit.*, h.119

nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda maka tidak dikenakan pajak progresif.

Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintah dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 berdasarkan nama dan alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kedua dikenakan tarif pajak progresif 2%, untuk kepemilikan ketiga sebesar 2.5%, dan untuk kepemilikan keempat dan seterusnya dikenakan pajak progresif 3%⁸⁴

Menurut Mardiasmo pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untu wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwasahnya pajak progresif belum diatur secara signifikan didalam Al-Qur'an akan tetapi pajak progresif masuk dalam kategori pajak secara umum.

⁸⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

Oleh sebab itu di tinjau dari *al-mashlahah al-mursalah* yang mana jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al-mursalah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. 1. Kedudukan Samsat Bandar Lampung

Secara umum Samsat di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan, Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah Samsat. Dalam oprasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia (Polri) yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PT. Jasa Raharja di bidang asuransi kecelakaan Lalu lintas.

Samsat Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan hasil realisasasi Kantor Bersama Samsat di Indonesia, berdasarkan

Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976. Samsat Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan 58 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ). (Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

2. Tugas Pokok dan Fungsi Samsat Bandar Lampung

Tugas pokok Samsat Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi Samsat Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan Samsat secara terpadu dan terkoordinasi antara Dipenda Provinsi Lampung, Polri dan PT Jasa Raharja;
- b. Menyelenggarakan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi Samsat dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, Pening dan Plat Nomor Kendaraan;
- c. Pendataan dan pemeriksaan Subyek/Obyek PKB dan BBN-KB;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penatausahaan pelaksanaan kegiatan);
- e. Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di Samsat;
- f. Penagihan piutang PKB dan BBN-KB dan penatausahaan penagihan piutang;
- g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan Samsat.

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

3. Visi dan Misi Samsat Bandar Lampung

Visi Samsat Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

- a. Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan daerah
- b. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan.

Strategi yang ditempuh Samsat Bandar Lampung dalam upaya mencapai visi dan misi di atas adalah:

- a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
 - (1) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan
 - (2) Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kepastian
 - (3) Menerapkan Pelayanan Prima
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (1) Mengintensifkan Penerimaan dan Melaksanakan Pungutan Secara Efektif dan Efisien

(2) Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan

(3) Menyosialisasikan setiap proses dan produk Kebijakan

Pemungutan

(4) Meningkatkan Koordinator dengan Instansi Terkait.

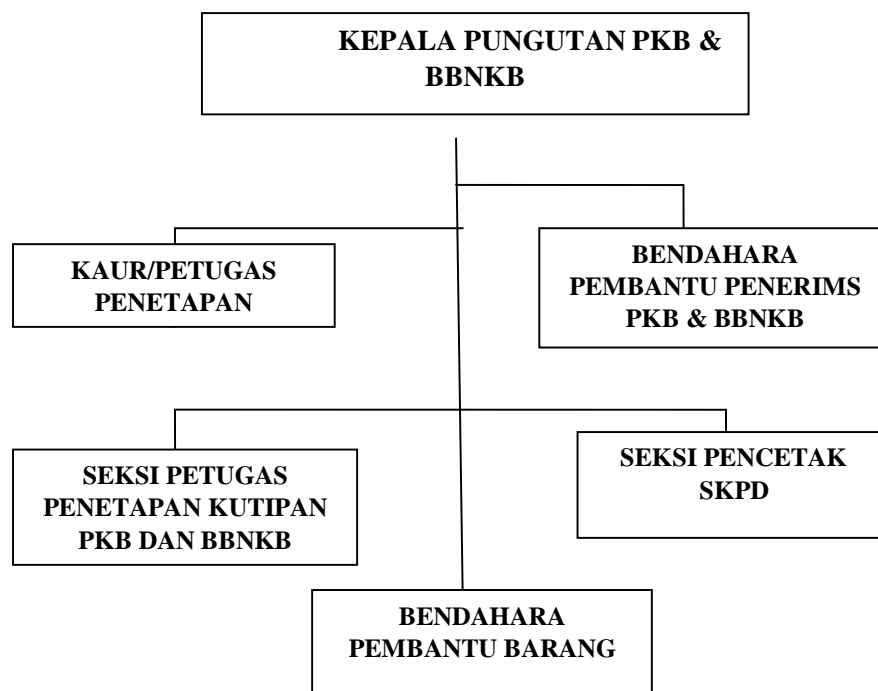
(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

4. Susunan dan Struktur Organisasi Samsat Bandar Lampung

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi Samsat Bandar Lampung adalah:

- a. Kepala Pungutan PKB dan BBNKB
- b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB
- c. Kaur/Petugas Penetapan
- d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
- e. Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- f. Bendahara Pembantu Barang

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dan komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut :



Gambar. Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung
(Sumber : SAMSAT Bandar Lampung Tahun 2014)

5. Uraian Tugas dalam Organisasi Samsat Bandar Lampung

Uraian tugas dalam organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai 2 fungsi, yaitu :

- (1) Pelaksana teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

- (2) Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

- b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB adalah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD
- (2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

c. Kaur/Petugas Penetapan

Kaur/Petugas Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB. Dan dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kaur/Petugas Penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- (1) Pelaksanaan pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB.
- (3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB.

d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
- (3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
- (4) Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

e. Seksi Non Pajak

Tugas pokok dari Seksi Pencetak SKDP adalah melaksanakan pelayanan di bidang pencetakan SKDP. Untuk melaksanakan tugas pokoknya,

Seksi Pencetak SKDP mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- (1) Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang pencetakan SKDP yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan monitoring dalam bidang di bidang pencetakan SKDP

(3) Pengendalian pelayanan di bidang pencetakan SKDP

f. Bendahara Pembantu Barang

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Barang adalah melaksanakan kegiatan operasional UPTD di bidang pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut, Bendahara Pembantu Barang mempunyai fungsi seperti:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pencatatan dan inventarisasi, barang di Samsat
- (2) Pelaksanaan administrasi pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana kerja pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.

Samsat Bandar Lampung sebagai suatu organisasi merupakan adalah suatu kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu

kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering diidentifikasi dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

B. Praktek Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Menurut Perda No 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ada di Provinsi Lampung. Menurut Bapak Nofirdon selaku Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah ia menjelaskan tujuan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi

lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang diwiliki wajib pajak dalam arti ia mampu secara ekonomi.¹

Penetapan pajak progresif ini untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada *database* objek kendaran bermotor, maka dari itu kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan. Kepemilikan kendaraan bermotor ini untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan. Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah nama dan alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta jenis kendaraan yang sama. Akan tetapi apabila didalam pencatatan nama dan alamat yang sama tersebut terdapat kesalahan penulisan huruf pada nama, maka tidak akan dikenakan pajak progresif, karena data yang didapat berbeda dengan

¹ Wawancara dengan Bapak Nofirdon, Selaku Pegawai Negeri Sipil di Bapenda Bagian Kepengurusan Pajak Progresif, tanggal 21 November 2017

pencatatan kepemilikan sebelumnya sehingga kepemilikan kendaraan kedua tidak dikenakan pajak progresif.²

Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)³

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di SAMSAT Kota Bandar Lampung dengan Bapak Hasanuddin Tirtayasa, S.E., M.M. (Kepala kasi Penagihan dan Penerimaan) beliau mengatakan:

Sejak adanya peraturan daerah tentang pajak daerah khususnya pajak progresif kendaraan bermotor memang telah diberlakukan dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi bahwa dalam setiap peraturan baru tentu adanya beberapa kendala yang dihadapi salah satunya dalam penerapan

² Wawancara dengan Bapak Praditha, Pegawai Negeri Sipil di Bapenda, tanggal 21 November 2017

³ Peraturan Perda No 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

pajak progresif ini baik dari pihak SAMSAT maupun wajib pajak.

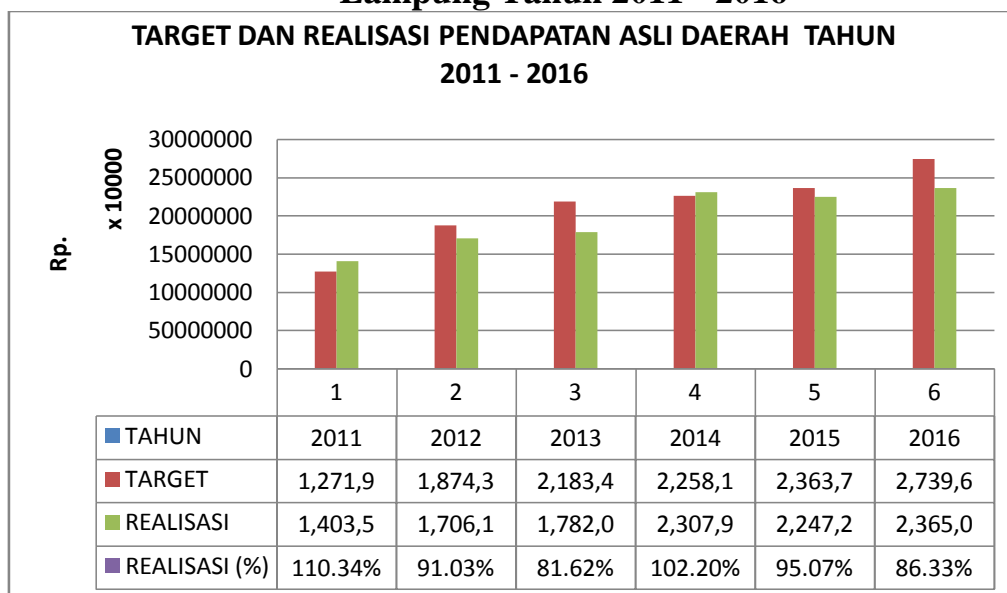
Pertama Salah satunya kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang berada di luar perkotaan Kota Bandar Lampung banyak diantara mereka yang kurang mengetahui tentang adanya pajak progresif baru ini yang diterapkan pemerintah daerah. *Kedua*, adanya wajib pajak yang menunda pembayaran dikarenakan adanya pajak progresif tersebut dengan alasan uang yang akan dibayarkan tidak mencukupi sehingga membuat wajib pajak enggan membayar pajak. *Ketiga*, banyak wajib pajak yang belum melaporkan kendaraannya bahwa kendaraan tersebut telah dijual kepada orang lain.⁴

Akan tetapi tidak semua masyarakat enggan membayar pajak progresif kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bandar Lampung. Banyak pula masyarakat yang membayar pajak progresif kendaraan bermotor, dengan diterapkannya pajak progresif ini maka Pendapatan daerah provinsi Lampung bertambah ini semua dapat kita lihat dalam grafik kurun waktu 5 tahun Pendapatan asli daerah

⁴ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala kasi Penagihan dan Penerimaan di SAMSAT, tanggal 23 November 2017

(PAD) mengalami peningkatan cukup baik. Pada tahun 2012 realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 1.706.131.403.523,- dan pada tahun 2016 realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 2.365.097.213.971,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 658.965.810.448,- dari tahun 2012. Pada tahun 2016 target Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp. 2.739.699.673.189,- sementara realisasinya sebesar Rp. 2.365.097.213.971,- dengan persentase capaian sebesar 86,33%.⁵

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2016



(Sumber data dari Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016)

⁵ Piterdono, *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah*, (Bandar Lampung: Badan Pendapatan Daerah, 2017), h. 7

Pendapatan asli daerah (PAD) tingkat pencapain selama 2012– 2015 cenderung meningkat sedangkan pertumbuhan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5.24% dari tahun 2015.⁶ Adapun penjelasan dari tabel tersebut bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dengan diterapkannya pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sejak dikeluarkannya Perda tentang pajak progresif dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah meningkat sejak adanya tarif pajak progresif kendaraan bermotor.

C. Pendapatan Masyarakat Terhadap adanya Pajak Progresif

Berdasarkan wawancara saya dengan beberapa orang yang tinggal di Bandar Lampung dan orang-orang terdekat adapun pendapat masyarakat sebagai berikut :

1. Menurut Bapak Ayung, dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut pastinya menambah pendapatan pajak asli daerah bandar lampung, karena yang menikmati fasilitas umum itu sendiri adalah

⁶ Wawancara dengan Bapak Nofirdon, Selaku Pegawai Negeri Sipil di Bapenda Bagian Kepengurusan Pajak Progresif, tanggal 21 November 2017

masayarakat, jadi menurut saya tidak menjadi masalah apabila adanya suatu penerapan pajak progresif di Provinsi Lampung.⁷

2. Pendapatan lain juga dituturkan oleh Bapak Maman Surahman, Menurutnya dengan diterapkan pajak progresif tersebut membuat masyarakat merasa terbebani dengan adanya diterapkannya pajak progresif tersebut sehingga menimbulkan rasa ingin tidak membayar pajak secara tepat waktu sehingga terjadilah penunggakan dalam membayar pajak, ini pun dapat diliat dalam beberapa bulan ini di Samsat Kota Bandar Lampung dengan adanya Pemutihan yang begitu banyak masyarakat yang mengantri untuk membayar pajak. Dari sini pun dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.⁸
3. Menurut Mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung Raeza Desparda Mahasiswa Biologi Semester VII Fakultas Tarbiyah, ia juga sebagai wajib pajak progresif, ia menuturkan bahwa dengan adanya pajak progresif diterapkan di Bandar lampung ini suatu langkah yang baik untuk Pemerintahan Kota Lampung itu sendiri

⁷ Wawancara, dengan Bapak Ayung, Pengguna Pajak Progresif, Pada tanggal 18 November 2017

⁸ Wawancara, dengan Bapak Mawan Surahman, Pengguna Pajak Progresif Pada Tanggal 18 November 2017

karna dapat menambah pendapatan daerah, karna apabila dia mampu membeli kendaraan lebih dari satu berarti dia juga mampu untuk membayar pajak sebagai warga negara yang baik.⁹

4. Ini juga di tuturkan Bapak Sunarto Selaku Pemilik Travel di Gunung Sulah, saya setuju dengan adanya pajak progresif di terapkan dibandar lampung karena dapat mengurangi kemacetan sehingga dengan adanya pajak progresif menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi.¹⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diterapkannya pajak progresif terhadap wajib pajak ini menimbulkan 2 (Dua) dampak yakni dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya terjadinya suatu peningkatan pendapatan terhadap pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Lampung, Sedangkan dampak negatifnya banyak masyarakat yang belum tertib terhadap peraturan daerah, dan tidak mau membayar pajak progresif kendaraan bermotor secara tepat waktu.

⁹ Wawancara, dengan Raeza Desparda, Pada Tanggal 21 November 2017

¹⁰ Wawancara, dengan Bapak Sunarto, Pada Tanggal 23 November 2017

BAB IV

ANALISA DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, beserta data kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Pada Samsat Kota Bandar Lampung) ”**, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil analisa penulis yaitu sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Praktek Pajak Progresif Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Samsat Kota Bandar Lampung?

Secara pelaksanaan tarif pajak progresif ini sudah cukup berjalan di Kota Bandar Lampung ini dengan lancar sesuai dengan penelitian yang saya dapatkan di Kantor SAMSAT, dimana penerapan pajak progresif ini sudah berlaku dan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Akan tetapi memang ada kendala di masa pertama peraturan pemerintah ini di keluarkan karena namanya peraturan baru masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya pajak progresif.

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan berdasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan. Pengenaan pajak progresif ini tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Saat ini wajib pajak adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut

- a. Untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- b. Untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- c. Untuk kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif bermotor dikenakan berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaliknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja dan akibatnya terkena pajak progresif.

Masyarakat sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotorpun dikenakan secara progresif, yakni untuk kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2% (dua persen), kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).

Untuk menarik pajak progresif, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung akan melihat alamat yang tertera dalam Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Jika dalam satu keluarga

misalnya memiliki empat mobil dan atas nama yang sama maka secara otomatis akan dikenakan tarif pajak progresif.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melalui Samsat juga akan melakukan proses update jumlah kendaraan. Jika dulu mempunyai empat mobil dan sekarang kurang dari empat, maka pemilik harus segera melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah. Dengan diterapkannya kebijakan ini maka diharapkan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dapat berkurang dengan adanya tarif pajak progresif masyarakat dapat diajak berpikir untuk tidak memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat lebih dari satu. Berlakunya tarif pajak progresif ini dapat menimbulkan dua dampak positif dan negatif bagi masyarakat, dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, membuat masyarakat menjadi lebih taat hukum. Sedangkan dampak positif bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah Pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak Progresif di SAMSAT Kota Bandar Lampung?

Sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya, demikian pula dengan tujuan ekonomi islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia wajib melaksanakan tugasnya terhadap Tuhan, dirinya, keluarganya dan seluruh umat manusia juga terhadap negaranya, salah satunya menunaikan kewajiban membayar zakat.

Dalam ajaran Islam pajak disebut dengan istilah *Adh-Dharibah*, dan ada istilah beberapa yang mirip dengan pajak salah satunya *al-jizyah* (upeti yang harus dibayar ahli kitab kepada pemerintah Islam), *al-Usyr* (bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam). Jika kita perhatikan istilah–istilah itu dapat kita simpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-muslim sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya,

Para ulama berbeda pendapat terhadap adanya pajak mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di perbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara muslim. Pajak memang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. Bagi umat Islam ada kewajiban lain terkait pemotongan harta yaitu zakat.

Umat Islam tidak perlu mempertentangkan kedua kewajiban tersebut, karena dalam sistem ekonomi Islam dikenal dua sumber dana untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yaitu zakat dan pajak. Zakat dan Pajak meskipun sama-sama kewajiban, tetapi mempunyai dasar berpijak berlainan.

Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri (Pemerintah) menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Di Indonesia ada beberapa pajak yang harus dibayar salah satunya Pajak kendaraan bermotor yang secara progresif, akan tetapi pajak progresif itu sendiri memang belum diatur di dalam hukum Islam, akan tetapi kewajiban pajak telah di sosialisasikan secara menyeluruh sejak beberapa tahun yang lalu, begitupun zakat telah menjadi urusan negara sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Jadi penerapan pajak progresif khususnya di Provinsi Lampung ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah menurut hukum Islam diperbolehkan, dengan alasan untuk membantu pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dan untuk kemaslahatan umat khususnya di Provinsi Lampung tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pajak progresif sudah sesuai dengan undang-undang Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Kota Bandar Lampung. Maka peranan pajak progresif memberikan pengaruh positif bagi Pendapatan Asli Daerah terutama pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dalam pandangan Hukum Islam itu diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan kegunaannya untuk masyarakat itu sendiri dalam pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya.

B. Saran

a. SAMSAT Kota Bandar Lampung

1. Untuk Samsat Kota Bandar Lampung harus lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat terpencil baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner dan lain-lain) dan media elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang adanya pajak

progresif sehingga mereka mengerti dengan adanya pajak progresif tersebut.

2. Menyediakan loket pelayanan khusus buat pajak progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dengan wajib pajak, apabila wajib pajak menyatakan kendaraan bermotor mereka sudah dipindah tangankan, maka wajib pajak untuk membuat surat pernyataan diatas materai, guna merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor.

b. Wajib Pajak

1. Diharapkan kepada masyarakat lampung apabila mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor maka harus segera membayar pajak progresif kendaraan bermotor dan mentaati peraturan pemerintah.
2. Apabila kendaraan yang dulu kita memiliki sudah berpindah tangan kepada orang lain maka segera melaporkan ke pihak samsat bahwa kendaraan tersebut sudah saya jual, agar melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik pertama kendaraan bermotor sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdurrahman Mawan, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung : Penerbit Tafakur, 2011).
- Al-albani Nashiruddin Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Penerbit Pustaka As0sunnah,2009).
- Ash-Shiddieqy Hasbi Mohammad, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang :Pustaka Rizky Putra,2001).
- Atep Adya Barata, *Perpajakan*, (Bandung : Penerbit CV. ARMICO, 1995).
- Devano Sony ,Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan*, (Bandung: Penerbit Prenada Media Group, 2006).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pes,2007).
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit,Fakultas Psikologi UGM, 1981).
- Harahap Isnaini dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*,(Medan : Prenadamedia Group, 2015).
- Kartini Kartono,*Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cetakan ketujuh,Bandung: Mandar Maju,1996).
- Mulati Ajeng,*Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung*.
- Munawir, *Pepajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberti Yogyakarta, 1997).
-, *Pokok-pokok perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985),

Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010).

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Mardiasmo. *Tax Perpajakan Edisi Terbaru*, (Bulaksumur : Penerbit Andi, 2016).

Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiiskal*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006).

Santoso Brotodihardjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2003).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Sonny, Isnianto, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Yogyakarta : Penerbit CV.Andi, 2009).

Suhayati Ely, Kurnia Siti, *Perpajakan*, (Bandung: Penerbit Graha Ilmu Cetakan Pertama, 2009).

Salim Peter dan Yenni Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Modern English Press, Jakarta, 1999).

Sutedi Andrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2013).

Suryani Trisna, Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, (Semarang : Penerbit Graha Ilmu, 2011).

Siahaan Pahala Marhot, *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2008).

Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta:PT.Raja Fahd, 1971).

Safari Iman Asyari, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian SosialII* (Surabaya: Usaha Sosial, 1981).

Sumurun Harahap, *Paradigma Baru Waqaf*, (Jakarta: Diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2002).

Zuraida Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Cordoba, 2013),

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004).

Jizyah adalah pajak per-kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011.

